

Analisis Pengaruh Rasio Efektivitas, Kemandirian dan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Kendari Provinsi Sultra

Author

Armiyani¹, Masdar Mas'ud², Ratna Dewi³

Email

armiyani72@gmail.com¹, masdar.mas'ud@umi.ac.id², ratna.dewi@umi.ac.id³

Afiliasi

Magister Manajemen, Universitas Muslim Indonesia¹, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia^{2,3}

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh rasio efektivitas, rasio kemandirian dan rasio Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Kendari. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Jumlah pengamatan dalam penelitian adalah 10 tahun. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif, yaitu analisis data yang menggambarkan analisis kinerja keuangan pada BPPRD kota Kendari provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yaitu rasio efektivitas, rasio kemandirian dan rasio kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kantor BPPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kantor BPPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Rasio kontribusi pajak daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kantor BPPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kata kunci: Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian, Rasio Kontribusi, Pendapatan asli Daerah

Pendahuluan

Pajak sebagai sumber perwujudan kewajiban kenegaraan. Penerapan Sistem Desentralisasi atau Otonomi Daerah diharapkan Daerah mampu mengelola dana membangun daerahnya sendiri yang berhubungan dengan hasil yang di peroleh dari pengelolaan sumber daya yang tersedia di masing-masing Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mampu melaksanakan Otonomi Daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan dan pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya bersumber dari Pajak

Daerah perlu di optimalkan atau ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah tersebut dapat diwujudkan.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Mardiasmo dalam Fauzi (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah secara terus-menerus dapat memacu pertumbuhan kinerja keuangannya. Jumlah dan kenaikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Florida, 2007). Analisis kinerja keuangan yang digunakan adalah Analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan tersebut adalah rasio efektifitas, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan dan rasio kontribusi.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah Rasio Efektifitas berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Kendari ?, (2) Apakah Rasio Kemandirian berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Kendari ? dan Apakah Rasio Kontribusi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Kendari ?

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis Pengaruh Rasio Efektifitas terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari, (2) Untuk menganalisis Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Kendari dan (3) Untuk menganalisis Pengaruh Rasio Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Kendari.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder untuk menganalisis pendapatan asli daerah pada kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Kendari provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam rangka penelitian ini, penulis melakukan penelitian di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Kendari provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini berlangsung selama dua bulan dimulai pada bulan Januari sampai Maret 2018.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang bersangkutan, seperti laporan keuangan dan sumber data data sekunder, adalah data yang diperoleh berupa laporan-laporan dan informasi lain yang bersumber dari literatur dan informasi lain yang berhubungan dengan penyusunan penulisan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk dokumen-dokumen, arsip-arsip, maupun data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan Sampel dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2009–2018.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Penggunaan model uji regresi linear berganda akan membantu untuk melakukan identifikasi setiap variabel independen yang diteliti, sehingga nampak variabel mana dari variabel independen yang sangat berpengaruh terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun secara parsial. Pembuktian secara statistik hubungan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi linear berganda pada taraf kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$.

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_i$$

Keterangan

Y = Penerimaan PAD

b_0 = Konstanta

X_1 = rasio efektivitas

X_2 = rasio kemandirian

X_3 = rasio kontribusi

e_i = eror term (5%)

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi

Hasil dan Pembahasan

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan apabila ingin meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih variabel bebas (X) terhadap sebuah variabel terikat (Y) atau untuk membuktikan bahwa terdapat atau tidak terdapatnya hubungan antara dua variabel atau lebih variabel bebas dengan sebuah variabel terikat. Analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1. Analisis Regresi Linear Ganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	22.033	1.842	
Efektivitas	.006	.018	.039
Kemandirian	.105	.018	.807
Kontribusi	.028	.014	.269

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Hasil Analisis Data 2019

Tabel diatas menunjukkan hasil olah data regresi atas Efektivitas pajak daerah, kemandirian dan kontribusi terhadap kinerja keuangan pendapatan asli daerah. Hasil persamaan regresi linear berganda dari model penelitian ini yaitu :

$$Y = 22,033 + 0,006 X_1 + 0,105 X_2 + 0,028 X_3$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda tersebut diuraikan sebagai berikut: (1) Konstanta $b_0 = 22,033$ menyatakan bahwa jika variabel independen efektivitas pajak daerah X_1 , kemandirian X_2 dan kontribusi X_3 konstan, maka Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Kendari adalah sebesar 22,033, (2) $b_1 = 0,006$ menunjukkan bahwa, jika variabel efektivitas pajak (X_1) ditingkatkan, maka Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Kendari akan meningkat sebesar 0,006 dengan asumsi variabel X_2 dan X_3 konstan, (3) $b_2 = 0,105$ menunjukkan bahwa, jika variabel kemandirian (X_2) ditingkatkan, maka Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Kendari akan meningkat sebesar 0,105 dengan asumsi variabel X_1 dan X_3 konstan dan (3) $b_3 = 0,028$ menunjukkan bahwa, jika variabel kontribusi (X_3) ditingkatkan, maka Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Kendari akan meningkat sebesar 0,028 dengan asumsi variabel X_1 dan X_2 konstan.

Pengujian hipotesis secara simultan bertujuan untuk melihat pengaruh semua variabel independen Efektivitas Pajak Daerah (X_1), Kemandirian (X_2) dan Kontribusi (X_3) terhadap variabel dependen Kinerja Keuangan Pendapatan Asli Daerah (Y). Hasil pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4.412	3	1.471	20.195	.002 ^a
Residual	.437	7	.073		
Total	4.849	10			

a. Predictors: (Constant), Kontribusi, Efektivitas, Kemandirian

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Hasil Analisis Data 2019.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh adalah F hitung 20,195 > F tabel 4,76 dengan tingkat signifikan 0,002 yang lebih kecil dari tingkat signifikan α 0,05 atau ($0,002 < \alpha$ 0,05). Keputusannya, karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka disimpulkan bahwa secara bersama-sama efektivitas (X_1), kemandirian (X_2) dan kontribusi (X_3) mempengaruhi secara simultan dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Kendari.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial digunakan untuk melihat variabel independen dalam hal ini Efektivitas Pajak Daerah (X_1), Kemandirian (X_2) dan kontribusi (X_3) secara parsial mempengaruhi variabel dependen Kinerja Keuangan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Kendari. Hasil pengujian

secara parsial dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1(Constant)	22.033	1.842		11.963	.000
Efektivitas	.006	.018	.039	.314	.764
Kemandirian	.105	.018	.807	5.952	.001
Kontribusi	.028	.014	.269	1.963	.097

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Hasil Analisis Data 2019

Tabel di atas menunjukkan nilai t-hitung dari hasil perhitungan SPSS untuk masing-masing variabel yaitu variabel efektivitas diperoleh nilai t-hitung 0,314, variabel Kemandirian diperoleh nilai t-hitung 5,952 dan variabel Kontribusi diperoleh nilai t-hitung 1.963.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menerangkan seberapa besar pengaruh dari seluruh variabel independen Efektivitas Pajak Daerah (X_1), Kemandirian (X_2) dan Kontribusi (X_3) terhadap variabel dependen kinerja keuangan PAD (Y). Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4. Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.954 ^a	.910	.865	.26985

a. Predictors: (Constant), Kontribusi, Efektivitas, Kemandirian

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Hasil Analisis Data 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) adalah 0,954. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen yaitu efektivitas pajak, Kemandirian dan kontribusi terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan PAD pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 95%, sedangkan sisanya 5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Sebagaimana diketahui bahwa penelitian ini secara serentak atau bersama-sama ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan yang dibuktikan dengan besarnya koefisien desentralisasi (R^2) = 0,954 atau 95%. Artinya pendapatan asli daerah dapat diprediksikan bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menggunakan ketiga variabel bebas tersebut. Sedang adanya sisa 5% menunjukkan bahwa masih perlu mencari

variabel yang belum dapat teridentifikasi dalam penelitian ini, sehingga bagi para peneliti selanjutnya harus menelusuri lebih mendalam sehingga ditemukan variabel yang dapat memperbesar pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut.

Di samping memperlihatkan temuan secara serentak atau simultan ketiga variabel tersebut, maka secara parsial ketiga variabel bebas juga perlu dibahas terhadap variabel terikatnya. Untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh tersebut, maka berikut ini akan diuraikan satu persatu:

Pengaruh Efektivitas Pajak Daerah terhadap pendapatan asli daerah

Rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah selama 10 tahun pada Kantor BPPRD kota Kendari memiliki rata-rata tingkat efektivitas cukup efektif dan cenderung ke efektif. Tetapi rasio efektivitas pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan sebesar 96.95% dan 98.63%. Terkait dari hasil penelitian yang di olah menunjukkan bahwa variabel efektifitas terhadap t-hitung 0.314 bahwa variabel pada efektifitas tidak berpengaruh karena H_0 diterima H_a di tolak, begitu juga dari tabel rasio efektifitas pada tahun 2016 dan 2017 yang menunjukkan bahwa nilai yang di dapat tidak efektif karena tidak mencapai target.

Rasio efektifitas yang cukup efektif dan cenderung ke efektif mengakibatkan kemampuan keuangan daerah kota Kendari dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, karena relatif rendahnya basis pajak/retribusi yang ada di daerah dan kurangnya pendapatan asli daerah yang dapat digali oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk basis pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang di dalam pemungutan/pengenaannya berdasarkan undang-undang/peraturan pemerintah, dan daerah hanya menjalankan serta akan menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan.

Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Perimbangan dari Provinsi, dan pendapatan sah lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2014) yang berjudul analisis kinerja keuangan pada dinas pendapatan, pengelolaan, keuangan dan asset (DPPKA) kabupaten kepulauan sangihe, dengan hasil penelitian rasio efektivitas tidak berjalan secara efektif, rasio kemandirian adalah rendah, rasio pajak menurun dari tahun sebelumnya dan rasio pertumbuhan berfluktuasi.

Pengaruh Kemandirian Terhadap pendapatan asli daerah

Kemandirian terhadap kemampuan kinerja keuangan pada kantor BPPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2008–2017 adalah rendah sekali, walaupun cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi.

Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan kinerja keuangan pada rasio kemandirian dikarenakan perbedaan faktor-faktor kontribusi PAD seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah, baik pada target PAD maupun realisasi PAD pada kantor BPPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD.

Kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kantor BPPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Kemandirian dengan pendapatan asli daerah, dalam arti jika terjadi peningkatan Rasio Kemandirian, maka pendapatan asli daerah cenderung meningkat. Hal ini terlihat dari rasio kemandirian mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun awal perhitungan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat (Halim, 2008:5) bahwa Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti semakin tinggi pula kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Rasio Kontribusi terhadap pendapatan asli daerah

Berdasarkan kriteria rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD, maka kinerja keuangan kantor BPPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2017 dapat dikatakan baik. Adanya fluktuasi rasio kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dikarenakan adanya kesenjangan kinerja keuangan pada rasio pajak Daerah terhadap PAD dikarenakan perbedaan faktor-faktor penurunan pajak seperti insentif

pajak yang berlebihan dan salah sasaran, Anjloknya pembayaran pajak oleh WP besar. Padahal usaha mereka sebenarnya meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Seperti; aparat pajak dapat meningkatkan dan mempercepat roda perputaran pajak. Para aparat pajak maupun Ditjen pajak seharusnya tidak boleh lalai terhadap orang yang lalai pajak juga, karena dengan pajak mampu menolong peningkatan keuangan negara. Aparat pajak tidak boleh melakukan dispensasi terhadap orang atau kelompok tertentu sehingga dapat merugikan negara.

Rasio kontribusi pajak daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kantor BPPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kantor BPPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam arti jika rasio kontribusi pajak daerah meningkat, maka pendapatan asli daerah cenderung meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Erlina (2013) dengan judul kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD dan dampaknya bagi pengembangan wilayah provinsi Sumatra utara dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kontribusi berpengaruh positif terhadap wilayah provinsi Sumatra utara dimana apabila penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat, maka PDRB perkapita provinsi sumatera utara juga akan meningkat. Perubahan perkapita provinsi sumatera utara dipengaruhi oleh perubahan pajak kendaraan bermotor.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Rasio efektivitas tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kantor BPPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. (2) Rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kantor BPPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. (3) Rasio kontribusi pajak daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kantor BPPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka diberikan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD pada kantor BPPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah daerah supaya mempertahankan bahkan berupaya meningkatkan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk tahun selanjutnya. (2) Rasio Efektivitas untuk kinerja keuangan pada kantor BPPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara diperoleh nilai rata-rata 104,56% atau kategori efektif, kecuali pada tahun 2016-2017 cenderung mengalami penurunan. Hendaknya pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan berusaha meningkatkan pajak daerah sehingga efektivitas pajak daerah dapat berpengaruh secara signifikan terhadap PAD

pada kantor BPPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. (3) Hasil perhitungan rasio kemandirian tingkat ketergantungan daerah dengan pihak ekstern (pemerintah pusat dan propinsi) cukup tinggi, hendaknya pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Karena kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PAD pada kantor BPPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. (4) Rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD untuk tahun 2008-2017 dapat digolongkan baik, hendaknya pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Seperti; aparat pajak dapat meningkatkan dan mempercepat roda perputaran pajak.

Referensi

- A.Dwiayu Permatasari, 2016. Analisis Kinerja Keuangan Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Barru dan kota Makassar. *Tesis*. UMI Makassar.
- Abdul Halim. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- ,2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Arif Kurniawan, 2015. Penilaian tingkat kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Boyolali Periode tahun 2011-2013. *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Assidiqi, 2014. Analisis kinerja keuangan pendapatan daerah Kabupaten Klaten dilihat dari pertumbuhan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Klaten selama Tahun 2008-2012. *Tesis*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- Bisma, I Dewa Gde dan Hery Susanto. 2010. "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007". *GaneÇ Swara* Edisi Khusus Vol. 4. (Desember). No.3.
- Ghozali, Imam, 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Gujarati, Damodar dan Porter, Down. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika* Edisi Ke 5. Salemba Empat, Jakarta.
- Juliani Dora.2017. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014. *Tesis*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Julitawati, Ebit., Darwanis., Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi*, 1 (1): 15-29.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan Edisi Revisi 2002*. Andi. Yogyakarta.
- Mesak Borolayuk, 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah*. Journal Vol 1, 012
- Mohamad Mahsun. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE

- Yamin, Sofyan, Rachmah A., L., dan Kurniawan H., 2011. *Regresi dan Korelasi dalam Genggaman Anda: Aplikasi dengan Software SPSS, Eviews, Minitab, dan Statgraphics*. Salemba Empat, Jakarta.
- Rahmayati, 2016. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sukoharjo Tahun anggaran 2011-2013. *Journal* Vol VI, Juli-Desember 2016.
- Rai, I Gusti Agung. 2010. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Rita Engleni. 2001. “*Pentingnya Penyusunan Rencana Penerimaan PAD Jangka Menengah Dalam Menunjang Akuntansi Manajemen Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang*”.
- Santosa. 2014. Analisis kinerja keuangan pada dinas pendapatan pengelolaan, keuangan, dan aset (DPPKA) kabupaten kepulauan Sangihe. *Journal*. ISSN 2303-1174
- Santoso Singgih, 2002. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Saputra, Sandy Candra, I Wayan Suwendra, dan Fridayana Yudiatmaja. 2016. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014”. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen* Vol. 4.
- Semmaila, B dan Siring, B, 2013. *Statistika Inferensial*. Cetakan 1, Penerbit Arus Timur, Makassar.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cetakan ke-15. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sumawan, I.W., dan I.M. Sukarta. Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14 (3): 1727-1754.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.